

Optimalisasi Perekonomian Masyarakat Padukuhan Plumbon Melalui Komersialisasi Gedung Serbaguna

Optimizing the Economy of the Padukuhan Plumbon Community Through Commercialization of Multipurpose Hall

Esti Mugi Lestari^{1a}

^{1a}Universitas Cokroaminoto Yogyakarta; Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Gambiran, Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, e-mail: estimugilestari9@gmail.com

(Diterima: 27-02-2025; Ditelaah: 06-03-2025; Disetujui: 26-04-2025)

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dengan tujuan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam dunia akademis ke dalam kehidupan nyata. Pada Padukuhan Plumbon, komersialisasi aset publik menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Pengabdian ini bertujuan menemukan solusi yang lebih optimal dalam pengelolaan gedung serbaguna agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengesampingkan aspek sosial. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif secara langsung terhadap pemerintah daerah, pengelola gedung serbaguna serta warga masyarakat Plumbon. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penyewaan Gedung dapat mengurangi beban iuran warga serta meningkatkan kualitas fasilitas. Namun, terdapat kendala seperti benturan jadwal kegiatan sosial dan perlunya transparansi keuangan. Komersialisasi gedung memberikan manfaat ekonomi, tetapi perlu perbaikan dalam manajemen aset dan partisipasi warga agar keseimbangan antara fungsi ekonomi dan sosial tetap terjaga.

Kata kunci: Komersialisasi, Gedung Serbaguna, Dampak Ekonomi, Manajemen Aset

Abstract

Community service program is an implementation of student community service with the aim of applying the knowledge gained in academia to real life. In Plumbon Hamlet, commercialization of public assets is a strategy to increase regional income without burdening the community. This service aims to find a more optimal solution in the management of multipurpose buildings so that they continue to provide economic benefits to the community without neglecting social aspects. The method of implementing this service uses a direct participatory approach to the local government, multipurpose building managers and Plumbon residents. The results of the service activities show that renting a building can reduce the burden of residents' contributions and improve the quality of facilities. However, there are obstacles such as clashing social activity schedules and the need for financial transparency. Commercialization of buildings provides economic benefits, but improvements are needed in asset management and community participation so that the balance between economic and social functions is maintained.

Keywords: Commercialization, Multipurpose Hall, Economic Impact, Asset Management

PENDAHULUAN

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat guna mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam dunia akademis ke dalam kehidupan nyata. Sebagai mahasiswi program studi Ekonomi Manajemen, keterlibatan penulis dalam program ini menjadi kesempatan untuk menganalisis dan memahami secara langsung dampak kebijakan ekonomi dalam skala lokal, khususnya dalam aspek pengelolaan aset publik. Aset dapat dikategorikan sebagai barang yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis dan nilai pertukaran yang digunakan oleh entitas bisnis, organisasi, atau individu (Lestari, 2019). Optimalisasi aset publik mengacu pada pemanfaatan fasilitas milik pemerintah atau komunitas untuk tujuan ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan efisiensi pengelolaannya. Menurut (Eljawati, 2021) optimalisasi aset merupakan upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan suatu aset dengan tujuan memberikan manfaat yang lebih besar darinya dan meningkatkan penerimaan pendapatan.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian di Padukuhan Plumbon, fokus utama kegiatan ini adalah menganalisis dampak ekonomi dari komersialisasi gedung serbaguna Balai RW 15. Kebutuhan publik terhadap fasilitas gedung multifungsi terus bertambah seiring dengan variasi acara, baik pribadi maupun organisasi, seperti pernikahan, seminar, dan diskusi (Ghazali, 2016). Gedung ini awalnya berfungsi sebagai fasilitas publik yang digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, namun dalam beberapa tahun terakhir telah dikomersialkan dengan sistem penyewaan. Fasilitas publik seperti gedung serbaguna, dikelola agar tetap efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Prinsip utama dalam pengelolaan fasilitas publik mencakup keberlanjutan finansial, aksesibilitas, serta keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi. Pengelolaan aset yang efektif dirancang untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang organisasi dengan menyesuaikan sumber daya yang diperlukan agar selaras dengan dinamika kebutuhan layanan publik (Hariyanto, 2019). Komersialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi pengelolaan dan pemeliharaan gedung, namun juga menimbulkan berbagai dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Fasilitas pendukung dan sekitar bangunan gedung berperan penting dalam memastikan bangunan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penggunaannya (RI, 2021). Warga Padukuhan Plumbon yang menggunakan fasilitas gedung multifungsi untuk berbagai acara, seperti pertemuan warga, hajatan, dan kegiatan sosial lainnya, kini harus menyesuaikan diri dengan sistem penyewaan. Hal ini menimbulkan beragam perspektif, baik dari pihak pengelola gedung, perangkat desa, maupun masyarakat pengguna. Beberapa warga merasakan manfaat dari sistem ini karena adanya peningkatan kualitas fasilitas, sementara yang lain menganggap komersialisasi ini membebani mereka secara finansial.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hasil sewa juga menjadi tantangan tersendiri. Minimnya transparansi dan kurangnya komunikasi antara pengelola gedung dan masyarakat dapat mempengaruhi

penerimaan serta keberlanjutan sistem komersialisasi ini. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi ekonomi dari kebijakan tersebut melalui observasi langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis data sekunder terkait pengelolaan aset publik.

Diharapkan melalui kegiatan pengabdian ini dapat ditemukan solusi yang lebih optimal dalam pengelolaan gedung serbaguna agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengesampingkan aspek sosial. Selain itu pemerintah daerah diharapkan bisa mandiri dalam pendanaan untuk meningkatkan APBD, karena ketergantungan pada dana pusat dapat menghambat pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan (Wafa, 2018). Keberadaan sistem komersialisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan pengelola, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat Padukuhan Plumbon secara keseluruhan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan persiapan perizinan dan survei awal di Padukuhan Plumbon untuk menilai kesiapan partisipan serta melakukan sosialisasi. Selanjutnya, dilakukan penyusunan instrumen pengabdian untuk disampaikan kepada para partisipan. Partisipan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi aparatur desa, pengelola gedung, dan pengguna/penyewa gedung serbaguna. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi yang melibatkan partisipasi aktif. Observasi awal dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lokasi untuk mengamati aktivitas komersialisasi gedung serbaguna, wawancara mendalam dengan partisipan untuk memahami dampak ekonomi yang dirasakan, serta analisis solusi yang lebih optimal dalam pengelolaan gedung serbaguna agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengesampingkan aspek sosial.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Pengaruh Komersialisasi Gedung Serbaguna terhadap Masyarakat Setempat

Komersialisasi Gedung Serbaguna RW 15 di Padukuhan Plumbon merupakan inisiatif dari Kepala RW 15. Langkah ini diambil dengan alasan bahwa jika gedung tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi aset yang mubazir, sementara biaya perawatan tetap diperlukan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan gedung, Kepala RW memutuskan untuk membuat lapangan bulutangkis di dalamnya dan menyewakannya kepada masyarakat sekitar Plumbon.

Pada malam hari, gedung ini disewakan selama lima hari dalam seminggu, sedangkan dua hari sisanya diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat Plumbon secara gratis. Sementara itu, pada siang hari, gedung digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat tanpa dipungut biaya. Beberapa kegiatan yang rutin diadakan di gedung ini meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), posyandu, senam,

perkumpulan warga, serta rapat-rapat tingkat RW. Selain itu, masyarakat Plumbon juga dapat menggunakan gedung ini secara gratis untuk acara individu, seperti pernikahan.

Pada bulan Agustus dan Oktober, gedung serbaguna tidak diperbolehkan untuk disewakan karena dikelola oleh pemuda untuk kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Sumpah Pemuda. Namun, pengecualian diberikan bagi instansi pemerintah Banguntapan yang ingin menyewa gedung. Untuk mahasiswa dan lembaga pendidikan, harga sewa diberikan secara kompetitif dengan harapan mereka dapat menjadi penyewa tetap.

2. Peningkatan Kesejahteraan Warga melalui Pemanfaatan Gedung Secara Komersial

Kebijakan komersialisasi gedung serbaguna memberikan manfaat ekonomi bagi warga Plumbon. Warga yang ingin menggunakan gedung ini untuk kepentingan pribadi, seperti pernikahan, tidak dikenakan biaya sewa, sehingga meringankan beban finansial mereka. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari penyewaan gedung juga mengurangi kebutuhan iuran rutin warga untuk biaya perawatan dan kebutuhan RW lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap menikmati fasilitas gedung tanpa harus terbebani biaya tambahan secara terus-menerus.

3. Tantangan dalam Pengelolaan Gedung Serbaguna sebagai Aset Komersial

Dalam proses pengelolaan gedung serbaguna, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala yang pernah terjadi adalah adanya kesalahpahaman di kalangan pemuda mengenai sistem penyewaan gedung. Namun, permasalahan ini berhasil diselesaikan melalui mediasi antara pihak pengelola dan pemuda setempat.

Selain itu, pernah terjadi benturan jadwal antara kegiatan PAUD dengan penyewaan lapangan bulutangkis akibat jadwal yang terlalu padat. Hal ini mengharuskan adanya penyesuaian jadwal agar tidak mengganggu kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya. Kendala lainnya adalah ketika ada rapat mendadak RW, kegiatan PAUD harus diliburkan karena gedung tidak memiliki ruang khusus yang dapat digunakan sebagai kelas alternatif.

4. Keberlanjutan Pengelolaan Gedung Serbaguna agar Tetap Memberikan Manfaat bagi Masyarakat

Pendapatan dari hasil penyewaan gedung digunakan untuk membayar jasa penjaga gedung serta biaya perawatan, sementara sisanya dimasukkan ke dalam kas RW. Seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran dicatat oleh Kepala RW sebagai pengelola gedung, dan laporan keuangan ini diserahkan kepada bendahara RW untuk dibacakan dalam rapat RW secara transparan.

Dengan sistem pengelolaan yang baik dan transparan, keberlanjutan komersialisasi gedung serbaguna dapat tetap berjalan tanpa menghilangkan fungsi sosialnya. Ke depan, perbaikan dalam sistem manajemen jadwal dan optimalisasi ruang akan menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa gedung ini tetap dapat digunakan secara efektif oleh seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Komersialisasi Gedung Serbaguna RW 15 di Padukuhan Plumbon merupakan strategi pengelolaan aset publik yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan serta menjaga keberlanjutan fasilitas. Kebijakan ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan mengurangi beban iuran warga dan menyediakan fasilitas gratis untuk kegiatan sosial tertentu. Selain itu, hasil penyewaan digunakan untuk perawatan gedung serta mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesalahpahaman terkait sistem penyewaan, benturan jadwal kegiatan, dan keterbatasan ruang alternatif. Transparansi dalam pengelolaan keuangan serta penyesuaian sistem manajemen jadwal menjadi aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan gedung. Dengan pengelolaan yang baik, komersialisasi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengesampingkan fungsi sosial gedung bagi masyarakat Padukuhan Plumbon.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Budi Hariyanto, I. M. N. (2019). *Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara Dengan Pendekatan Resource Based View (RBV)*. August. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3831>
- Eljawati, N. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 2019, 1–11. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/11/article/view/24297>
- Ghazali, M. M. (2016). Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Gedung Serbaguna dengan Menggunakan Metode Topsis (Studi Kasus: Kota Banjarmasin). *J-Intech (Jurnal of Information and Technology)*, 4(01), 107–114. <http://jurnal.stiki.ac.id/J-INTECH/article/view/70>
- Lestari, D. (2019). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Palopo (Studi Empiris Di BPKAD Kota Palopo). *Jurnal Manajemen Informatika*, 1(1), 1–13. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/11/article/view/24297>
- RI, P. (2021). Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021. *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(078487A), 483. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>
- Wafa, M. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional IENACO-2016*, 117.